IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TINJAUAN FIQH SIYASAH

Ukasyah

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Email: ukasyahukas@gmail.com

Abstract

This research specifically understands and examines the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in administering village governance from the perspective of Fiqh Siyasah. This research is included in the category of field research, which is a research that is carried out systematically by collecting data in the field. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The subjects in this study consisted of BPD, Village Head, Village Secretary, Head of Government, community leaders, and youth leaders. The research object is to study the function of BPD from the Fiqh Siyasah perspective. The results showed that the BPD of Ujumbou Village was not optimal in carrying out its functions. There are several inhibiting factors in the implementation of BPD functions, namely village facilities and infrastructure, inadequate funding and human resources. Based on the Siyasah Fiqh review, the BPD is synonymous with the ahl al-hall wa al-aqd institution as an institution that has a legislative function that drafts laws and regulations including village regulations at the village level and supervisory functions, and carries out deliberations to resolve all problems faced by the community as exemplified by the Prophet Muhammad, but in its implementation the BPD in Ujumbou Village has not been optimal in carrying out its functions.

Keywords: Function, Village Consultative Body, Village Administration, Fiqh Siyasah

Abstrak

Penelitian ini secara spesifik memahami dan mengkaji implmentasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Pemerintahan, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Adapun objek penelitiannya adalah mengkaji fungsi BPD perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Ujumbou belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Terdapat beberapa faktor

penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu sarana dan prasarana desa, pendanaan dan sumber daya manusia yang belum memadai. Berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah, BPD identik dengan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi yang merancang peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa di tingkat desa dan fungsi pengawasan, dan melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, namun dalam implementasinya BPD di Desa Ujumbou belum Optimal dalam menjalankan fungsinya.

Kata Kunci: *Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, Fiqh Siyasah*

A. Pendahuluan

Islam sangat menganjurkan musyawarah. Terbukti pada masa Nabi saw. banyak persoalan umat diselesaikan melalui mekanisme *syura* (permusyawaratan) antara beliau dan para sahabatnya. Bahkan dalam Islam, melaksanakan keputusan hasil musyawarah adalah wajib hukumnya. Tujuan musyawarah tak lain adalah untuk *sharing* ide dan gagasan untuk mencapai apa yang diidealkan bersama. Sebab, tidak mustahil ada ide cemerlang yang tidak diketahui oleh sebagian dari mereka, tetapi diketahui oleh yang lain.

Syura telah diaplikasikan dalam kehidupan dan perilaku-perilaku Nabi saw. yang umum, selain wahyu. Sebagaimana diaplikasikan para *Khulafaurrasyyidin* sesudahnya. Terutama dalam menyusun kaidah-kaidah (aturan-aturan). Islam telah menetapkan prinsip *syura* dalam lapangan pemerintahan dan mengharuskan (memegangnya) dengan teguh, serta menolak dan melarang kesewenang-wenangan dan tindakan pribadi.

Musyawarah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat berikut kebutuhan-kebutuhan politisnya yang membawa pada kemashalatan. Semua penetapan dalam musyawarah diserahkan kepada manusia, tetapi yang penting adalah menjalankan pemerintahan diawali dari penentuan pemerintah hingga pembuatan undang-undang, politik, dan administrasi. Sementara itu, penciptaan partisipasi umat dengan cara meyakinkan agar umat mau ikut dalam keputusan-keputusan politik dan legislatif yang mempengaruhi kehidupannya harus

dilakukan dan tidak boleh ditunda keputusan-keputusan politik dan legislatif yang mempengaruhi kehidupannya harus dilakukan dan tidak boleh ditunda.

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura* adalah *ahlu al-halli wa al-'aqdi* pada zaman *Khulafaurrasyidin*. Pembentukan lembaga *ahlu al-halli wa al-'aqdi* sangat perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan sehingga harus diputuskan secara bijak demi menciptakan kemashalatan umat Islam. Di dalamnya bangsa dan sebagian umat atau kaum cerdik pandai yang mewakilinya ikut terlibat. Sebagaimana juga pemerintah sesudah ia dipilih dan ditentukan dengan jalan *syura* ikut serta di dalamnya. Dengan begitu, keikutsertaan antara pemerintah dan rakyat atas umat terwujud. Sempurnalah pengikatan diri pemerintah dengan dua ikatan syari'at dan rakyat, yaitu hukum Allah dan opini umat.

Di dalam tatanan pemerintahan Desa kita mengenal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen/dewan *syuranya* pemerintahan desa. Kajian fiqh *siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menciptakan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (perwakilan).

Badan Perwakilan Desa yang selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah

untuk mufakat". Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, fungsi pengayom menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, fungsi pengawasan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Pemerintahan Desa merupakan mitra kerja pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai legislasi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jumlah anggota BPD dalam satu desa, bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota BPD lebih banyak maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju dengan tidaknya suatu desa tersebut lebih ditentukan dari kinerja BPD itu sendiri karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa.

Adanya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memperdayakan masyarakat desa di seluruh Indonesia dan masyarakat desa khususnya pada Desa Ujumbou, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai wewenang BPD pada Desa Ujumbou dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyalur aspirasi belum berjalan dengan baik karena BPD hanya menunggu saran dan masukan tetapi belum mampu mengenali kebutuhan masyarakat sehingga ada sebagian harapan masyarakat belum terpenuhi. Sehingga masyarakat menganggap bahwa kehadiran BPD sebagai perwakilan elemen masyarakat tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya, sedangkan keinginan masyarakat Desa Ujumbou menginginkan BPD dapat

menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya yang mengutamakan kepentingan desa masyarakat setempat.

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 55 menyebutkan bahwa BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik mengetahui bagaimana fungsi BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat-jerat kemiskinan dan krisis ekonomi. Harapan masyarakat Desa Ujumbou terhadap peran BPD adalah mampu memberikan perubahan yang lebih baik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa.

B. Pembahasan

1. Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

a. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Tabel VI
Data Mengenai PerDes Tahun 2021

No.	Perdes	Keterangan
1.	Perdes No. 2 Tahun 2021 tentang RKPDes	Telah ditetapkan
2.	Perdes No. 1 Tahun 2021 tentang APBDes	Telah ditetapkan

Sumber: Data pada kantor desa Ujumbou

Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD. Secara filosofis pentingnya peraturan desa adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat desa, menjaga hak-hak

masyarakat desa dan menjamin kebebasan masyarakat desa, serta memberikan keadilan bagi masyarakat. Selain itu peraturan desa juga bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam menyelenggarakan kegiatan di desa dan di dalam membangun dan mengurus desa, “membatasi kekuasaan” (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat.

Secara teknik pembentukan Perdes juga harus memenuhi syarat-syarat teknis pembentukannya, sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 29 tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.

Dalam pembentukan Perdes selain sesuai dengan kerangka yang ada maka harus juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Nomor 12 tahun 2011 Jo, Pasal 2 Permedagri Nomor 29 tahun 2006 dalam membentuk peraturan desa berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Arti dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangnya.
4. Dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta membahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan yaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

BPD di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat, peran BPD merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat sebagai penduduk desa, peran anggota BPD sangat penting bagi kemajuan pembangunan desa. BPD adalah lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk desa. Salah satu peran sentral BPD adalah dalam pembentukan perdes bersama dengan Kepala Desa, diharapkan dapat berkontribusi secara aktif untuk memberikan masukan dan koreksi BPD yang mewakili masyarakat desa agar

terwujudnya suatu perdes yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perdes adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemdes sebagaimana Kabupaten mengeluarkan peraturan daerah. Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh BPD. Perdes berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, BPD, dan masyarakat desa melalui musyawarah desa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan berprinsip pada asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja, mengenai peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Perda Kabupaten Donggala Nomor 04 Tahun 2008 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa menegaskan bahwa ada beberapa jenis peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa, salah satunya yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kepala desa dan BPD Desa Ujumbou secara bersama-sama membuat perdes Ujumbou Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan APBDes Tahun 2021. Dalam pembuatannya, peraturan desa tersebut telah melewati proses yang panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja.

BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja merupakan lembaga legislasi di Desa Ujumbou tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut sangat erat kaitannya dalam proses pembuatan Peraturan Desa khususnya dalam pembuatan perdes Ujumbou Tahun Anggaran 2021. Dalam proses pembuatan

peraturan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Perumusan merupakan munculnya gagasan dalam masyarakat. Dalam pembentukan peraturan desa, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal untuk terbentuknya suatu peraturan dalam masyarakat. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat di prakarsai oleh Pemerintah Desa ataupun dapat berasal dari inisiatif BPD.

Adapun tujuan pembuatan peraturan desa di desa Ujumbou ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Moh Zain Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala :¹

“Pembentukan peraturan desa bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa tentang APBDes sendiri dibuat karena untuk menciptakan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai, karena hal tersebut maka dibutuhkan peraturan untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi keharusan desa memiliki peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka dari itu kami selaku pemerintah desa mengusulkan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD desa Ujumbou untuk di tindak lanjuti.”

Dengan tujuan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa ini yaitu untuk mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Perdes dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya di masyarakat setempat. Isi dari peraturan desa sendiri tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu, dalam penyusunan perdes masyarakat berhak memberikan usulan atau masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Di desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, pihak desa dalam menampung aspirasi dari masyarakat dilakukan melalui musyawarah.

¹Hasil Wawancara dengan Bapak Zain Dg. Matata (Keapal Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, pada tanggal 27 Desember 2021.

Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun di desa Ujumbou. Musyawarah RT dan dusun tersebut merupakan media bagi pemerintah desa dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat desa Ujumbou dan merupakan wadah bagi masyarakat desa Ujumbou dalam menyalurkan aspirasinya. Hal ini didukung oleh keterangan dari Kaur Pemerintahan desa Ujumbou bapak Ayub yang menyatakan bahwa :²

“Sebelum pemerintah desa merumuskan rancangan peraturan desa, terlebih dahulu pemerintah desa mengumpulkan aspirasi atau usulan-usulan dari masyarakat yang dihasilkan dalam musyawarah dusun, yang dihadiri oleh RT, RW, Kadus, Perangkat Desa, anggota BPD yang di wilayah tersebut, dan tokoh masyarakat.”

Hal senada disampaikan juga oleh anggota BPD Desa Ujumbou bapak Arifudin yang menyatakan bahwa:³

“Usulan tersebut bisa datang dari masyarakat lewat musyawarah dusun yang diadakan di tiap dusun yang ada di Desa Ujumbou. Dimana rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, Kadus, dan BPD yang ada di wilayah tersebut. Tujuannya untuk penyampaian mengenai masukan-masukan dari warga agar setiap kegiatan yang dilaksanakan terdapat payung hukumnya. Dan dalam perumusan Perdes tersebut harus ada keseimbangan antara Pemdes dan masyarakat supaya tidak sewenang-wenang.”

Pengumpulan aspirasi tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Ujumbou melakukan musdus untuk mengumpulkan masyarakatnya. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut diberikan kepada pihak pemerintahan desa sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Ujumbou bapak Baldam:⁴

²Hasil Wawancara dengan Bapak Ayub (Kaur Pemerintahan Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 29 Desember 2021.

³Hasil Wawancara dengan Bapak Arifudin (Anggota BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 29 Desember 2021.

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Baldam (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 1 Januari 2022.

“Ide atau gagasan dalam penyusunan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi Rancangan Perdes atau tidak.”

Dalam proses penyusunan peraturan desa, disampaikan juga oleh Bapak Ismai (Sekretaris Desa Ujumbou) menyatakan bahwa :

“fungsi BPD dalam membahas dan meyeepakati rancangan Peraturan Desa sudah sangat baik. BPD melakukan rapat internal terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa, dan yang menjadi materi dalam rapat internal tersebut adalah berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Ujumbou. Pihak Desa membuat draf/rancangan atas masukan-masukan atau usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui BPD, setelah itu draft/rancangan tersebut diajukan kepada BPD untuk dievaluasi tentang kekurangannya, kemudian dilakukan pembahasan/pemaparan tentang rancangan tersebut bersama Kepala Desa untuk dijadikan Peraturan Desa. Sejauh ini BPD sudah menghasilkan beberapa Peraturan Desa dan BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.”

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara penulis bersama Bapak Ismai selaku Sekretaris Desa Ujumbou mengenai peran BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa Tahun Anggaran 2021 di Desa Ujumbou sudah sangat baik. Peran BPD dalam pelaksanaan penyusunan perdes dimulai dengan melakukan rapat internal terlebih dahulu. Serta peran masing-masing anggota BPD dituntut untuk lebih aktif menyuarakan aspirasi masyarakat desa, karena anggota BPD adalah wakil-wakil dari masyarakat agar nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat arif dan bijaksana bagi semua pihak dan tidak menimbulkan keresahan atau beban bagi masyarakat.

Pembahasan ialah pematangan gagasan yang muncul dalam masyarakat desa tersebut. Raperdes diterima oleh Pemerintah Desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes. Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab berkaitan dengan raperdes. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam raperdes dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD.

Raperdes yang diajukan bermula dari satu pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan

Perangkat Desa lainnya sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka perdes yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi perdes. Sehingga perdes yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi perdes. Pengambilan keputusan tentang perdes biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Ujumbou bapak Ismai :⁵

“Raperdes yang telah diterima oleh Pemerintah Desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Kemudian dalam pembahasan, BPD akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya perdes dan diadakan tanya jawab berkaitan dengan raperdes tersebut. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka setelah itu dapat diambil sebuah kesepakatan bersama dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi perdes. Setelah mendapat kesepakatan bersama, kemudian raperdes tersebut diajukan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan persetujuan. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah atau voting.”

Dalam rapat gabungan tersebut BPD mempunyai peranan membahas dan mengevaluasi raperdes tersebut. Setelah raperdes selesai dibahas, maka tahap selanjutnya adalah penetapan raperdes menjadi perdes. Selanjutnya tahap penetapan atau pengesahan raperdes yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD tersebut disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa. Penyampaian raperdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Kemudian BPD bersama Kepala Desa menetapkan raperdes tersebut menjadi sebuah perdes. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh bapak Ismai selaku Sekretaris Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala :⁶

“Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan perdes maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan raperdes tersebut menjadi perdes sesuai dengan Permendagri Nomor. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Ismai (Sekretaris Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 7 Januari 2022.

⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ismai (Sekretaris Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 7 Januari 2022.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa, penyampaian raperdes dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa, Kepala Desa kemudian memerintahkan kepada Sekretaris Desa untuk mengundang dalam lembaran Desa. Di Ujumbou jangka waktu penetapan Raperdes menjadi Perdes itu bisa langsung sehari jadi dalam waktu itu.”

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan perdes tentang APBDes Nomor 1 Tahun 2021 di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja dalam pelaksanaannya BPD melakukan rapat internal terlebih dahulu untuk membahas raperdes yang telah dirancang oleh Pemerintah Desa berdasarkan dari aspirasi masyarakat desa. kemudian BPD melakukan evaluasi dan setelah itu dilakukan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa hingga dapat disepakati sebagai perdes.

b. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁷ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan desa dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan anggaran dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rancangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan dan rencana pembiayaan yang di bahas dalam di setujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui

⁷Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 72.

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Pasal 1 angka 9.

APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.⁹

Telah dibahas sebelumnya bahwa Fungsi pengawasan pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014. Badan permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, yaitu Kepala desa Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) setiap akhir tahun anggaran.

Menurut wawancara dengan Ketua BPD Desa Ujumbou bapak Baldam mengatakan :¹⁰

“Dalam upaya pengawasan penggunaan Dana Desa BPD Desa Ujumbou mengambil upaya pengawasan administratif dan riil di lapangan. Upaya administratif diawali dengan perencanaan dan penyalur aspirasi-aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musrenbangdus dimana ditentukan bagian mana yang dibutuhkan, disetiap dusun kemudian BPD mengajukan saat musyawarah desa dan menentukan proyek yang masuk dalam skala 1 (meliputi pembangunan jalan), skala 2 (pembangunan irigasi), skala 3 (piparisasai) kemudian di serahkan terhadap perangkat Desa yang berwenang. Tingkat Perencanaan pembangunan dilakukan saat musrenbangdus kemudian dibawa ketingkat musrenbangdes dan ditentukan skala prioritas 1 2 3 dan dilaksanakan oleh perangkat Desa. Setiap Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbangdus harus membawa misi masing-masing dari setiap dusun untuk diperjuangkan. Karena Badan Permusyawaratan Desa berangkat dari tujuan yang sama yakni memberikan hak-hak masyarakat maka diperlukan BPD yang tidak hanya menjadi pelengkap lembaga saja melainkan mampu kritis dalam menyikapi apa yang diharapkan masyarakat atau persoalan dalam masyarakat. Kemudian di tunjuk TPK (tim pekerja lapang) untuk melakukan pemabangunan atau pengelolaan Dana Desa dilapangan. Setelah di lapangan pun BPD wilayah di tunjuk langsung untuk mengawasi penggunaan atau pun pengeleolaan Dana Desa di wilayah masing-masing guna terhindarnya pihak-pihak yang ingin menyelewengakan Dana Desa ,tetapi Badan permusyawaratan Desa (BPD) menghimbau agar masyarakat ikut serta mengawasi karena bisa saja apa yang di rencanakan dengan apa yang terjadi dilapangan tidak sama, karena bagaimana pun

⁹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan*, h. 85.

¹⁰*Hasil Wawancara dengan Bapak Baldam (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 1 Januari 2022.*

tujuan dari pengawasan tersebut agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya upaya pengawasan secara langsung guna merealisasikan gagasan-gagasan yang dilakukan oleh Kepala Desa memang benar-benar dijalankan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pelayanan terutama tentang Dana Desa.”

Penulis juga mewawancarai salah satu anggota BPD bapak Arifudin mengatakan bahwa :¹¹

“Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa hambatan yakni kurangnya transparansi Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat secara umumnya dan kurang harmonisnya hubungan sesama BPD karna adanya beberapa anggota BPD yang tidak mengambang pusing soal pengawasan dan adanya hubungan kekeluargaan yang erat antara salah satu anggota BPD dengan kepala Desa .”

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa masih eratnya hubungan kekeluargaan antara BPD dan Kepala desa serta kurang harmonisnya hubungan antara sesama anggota BPD dan kepala Desa. Yang hal demikian sebenarnya tidak bisa terjadi agar terciptanya pemerintahan yang mampu membawa harapan masyarakat agar keluar dari jerat-jerat kemiskinan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Penulis juga mewawancarai sekretaris Desa Ujumbou bapak Ismai mengatakan bahwa:¹²

“Jika terdapat penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa melakukan audit secara internal dan dipastikan apakah ada indikasi penyalahgunaan Dana Desa yang bisa dibuktikan maka Badan permusyawaratan Desa berkoordinasi kepada sekretaris Daerah untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya ”.

Penulis juga mewawancarai ketua BPD bapak Baldam :¹³

“Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Pengelolaan Dana Desa salah satunya adalah faktor sumber daya manusia (SDM) ,Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang masih awam dan tidak tau secara sistematis atau kritis dalam pengawasan tersebut akibatnya dapat di setir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.”

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Arifudin (Anggota BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 29 Januari 2022.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Ismai (Sekretaris Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 7 Januari 2022.

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Baldam (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 1 Januari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hak memperoleh pengembangan Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa belum terpenuhi sehingga sebagian anggota BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam ruang lingkup BPD sangatlah dibutuhkan oleh BPD itu sendiri agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan Dana Desa dengan baik dan lebih maksimal.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi pengelolaan dana desa sudah sesuai undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah Nomor 110 Tahun 2016.

c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi berasal dari kata *aspire*, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan aspirasi adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang aspirasi memiliki dua sifat yaitu :

- a. Sifat positif mereka yang ingin mendapatkan keadaan yang lebih baik atau lebih tinggi dari pada keadaannya sekarang.
- b. Sifat negatif keinginan mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini tanpa keinginan untuk meningkatkan apa yang sudah dicapainya.¹⁴

Di dalam memajukan desa aspirasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan atau landasan dibuatnya sebuah pembangunan tepat sasaran. Oleh karena itu, masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya baik melalui pemerintahan desa maupun badan permusyawaratan desa agar aspirasi dari masyarakat tersebut bisa terwujud.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, salah satu tugas dan fungsinya adalah menerima dan

¹⁴Pratiwi Wijayanti "*aspirasi hidup anak jalanan Semarang, tahun 2010*", (Semarang: Universitas Diponegoro: Fakultas Psikologi)

menyampaikan aspirasi masyarakat. Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan.

a. Penyampaian Langsung Kepada BPD

Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD. Adapun jenis aspirasi ini cenderung bukanlah masalah yang sangat mendesak bagi kepentingan desa, namun metode penyampaian aspirasi ini sangat efektif pada tahapan pelaksanaan program desa.

b. Penyampaian melalui Forum Desa

Penyampaian melalui forum desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Pada forum mengundang perwakilan masyarakat yaitu RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikuti sertakan BPD guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang atau sedang berlangsung.

c. Penyampaian melalui Forum Warga

BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang di adakan per wilayah. Masing-masing wilayah setiap bulan sekali mengadakan pertemuan dalam perkumpulan semisal arisan dan sebagainya. Adapun menurut hasil pengamatan penulis bahwa forum semacam ini tidak jauh berbeda dengan model penyampaian secara langsung.

Menurut wawancara dengan kepala Desa Ujumbou, bapak Zain mengatakan:¹⁵

“BPD sudah bekerja dengan baik karna jika dilihat beberapa pembangunan desa hasil dari aspirasi warga yang disampaikan kepada BPD baik melalui forum rapat, atau secara langsung berbicara kepada saya. tapi iya idak semua aspirasi dapat kita laksanakan. Karna ada pembangunan yang bersifat jangka panjang dengan pendek.

Aspirasi masyarakat adalah sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat termasuk di Desa Ujumbou sendiri. Di Desa Ujumbou BPD sangat

¹⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Zain Dg. Matata (Kepala Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, pada tanggal 27 Desember 2021.

diharapkan bisa membantu atau menjadi jembatan bagi masyarakat Desa Ujumbou untuk menyampaikan aspirasinya.

Penulis juga telah mewawancarai tokoh pemuda Ifan mengatakan bahwa :¹⁶

“soal masalah menampung aspirasi kami masyarakat, saya rasa BPD sudah mengerjakan hal sedemikian, banyak aspirasi kami ditampungnya, pengaduan dan keluhan kami masyarakatpun didengarnya. Termasuklah para pemuda, sebab pemuda juga banyak menyampaikan aspirasinya kepada BPD kalau masalah aspirasi semua ditampung oleh mereka.”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa fungsi dan tugas BPD Desa Ujumbou dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Juga sudah tertulis dalam Permendagri Nomor. 110 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPD salah satunya menyampaikan dan menampung aspirasi masyarakat dengan baik dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan. Faktor pendukung disini yang dimaksud adalah faktor yang menunjang serta mempermudah didalam proses pengawasan, dan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat dalam proses pengawasan.

a. Faktor Pendukung

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan bersama, partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya di lapangan.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Ifan (Salah Satu Tokoh Pemuda Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala) , pada tanggal 9 Januari 2022.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Ujumbou bapak Baldam, bahwa:¹⁷

“Yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik, dimana masyarakat yang ada di desa Ujumbou selalu terlibat dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan program oleh Pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi hal yang sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan masyarakat, BPD dapat terbantu dalam menjalankan fungsinya.

b. Faktor Penghambat

1. Sarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota BPD Desa Ujumbou Ibu Ega yang mengatakan bahwa:¹⁸

“Salah satu yang menjadi faktor yang menghambat kami selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami miliki adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor dan lain-lain”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Menyebabkan anggota Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

2. Pendanaan

Faktor pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus

¹⁷Wawancara dengan Bapak Baldam (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 1 Januari 2022.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Ega (Anggota BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 11 Januari 2022.

dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Ujumbou bapak Baldam :¹⁹

“Sebenarnya faktor penghambat kami adalah masalah Pendanaan ini merupakan permasalahan yang cukup penting dalam mengadakan setiap kegiatan desa. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut dengan terlaksananya suatu kegiatan yang membutuhkan dana operasional. selain itu kesejahteraan anggota BPD dirasakan kurang mencukupi, hal ini dirasakan ketika kami anggota BPD dituntut secara optimal untuk melakukan tugas dan tanggungjawab kami”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa biaya operasional anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mencukupi sehingga membuat anggota BPD belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebagaimana yang dikatan oleh Kepala Desa Ujumbou Moh Zain bahwa :²⁰

“Dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa Misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan peraturan desa, sebagian anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai sehingga fungsi BPD dalam membuat peraturan desa belum terlaksana dengan baik. Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Ujumbou bapak Baldam mengatakan bahwa:²¹

“Dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh pengembangan

¹⁹Wawancara dengan Bapak Baldam (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 1 Januari 2022.

²⁰Wawancara dengan Bapak Zain Dg. Matata (Keapal Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 27 Desember 2021.

²¹Wawancara dengan Bapak Baldam (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), pada tanggal 1 Januari 2022.

kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hak untuk memperoleh pengembangan Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa belum terpenuhi sehingga sebagian anggota BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

Dalam Islam dikenal adanya *fiqh siyāsah* seperti yang dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*” adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.²² Termasuk dalam pembahasan *siyāsah* adalah mengenai kekuasaan. Ibnu Taymiyyah mengenal pembagian kekuasaan dalam negara, seperti yang ditawarkan Jhon Locke dan Montesque yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif (*al-sultah tasyri’iyyah*), eksekutif (*al-sultah tanfiziyyah*), dan yudikatif (*as-sultah qada’iyyah*).²³

Dalam *fiqh siyāsah* dalam kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah tasyri’iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. *Al-sultah tasyri’iyyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah qada’iyyah*). Dalam konteks ini, Kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

²²H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47.

²³La Samsu, *Al-Sultah Tasy’iyyah Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah, Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, h. 158.

Dengan kata lain, *al-sultah tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam yang dilaksanakan oleh lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi*.²⁴

Menurut Abdul al-Hamid al-Anshari yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*" menyebutkan bahwa *ahlul ḥalli wal aqdi* ialah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah.²⁵ Menurut A. Djazuli dalam bukunya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *ahlul ḥalli wal aqdi* meliputi :²⁶

1. *Ahlul Halli Wal Aqdi* adalah pemenang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam;
2. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat;
3. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Quran dan hadis;
4. *Ahlul Halli Wal Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaan;
5. *Ahlul Halli Wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.

Dengan demikian *ahlul ḥalli wal aqdi* adalah lembaga perwakilan yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi maupun suara masyarakat. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat. *Ahlul halli wal aqdi* dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridho kaum muslimin atau sebagai perwakilan kaum muslimin dalam tatanan pemerintahan yang membawa aspirasi

²⁴Ibid

²⁵J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 66.

²⁶H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 76.

kaum muslimin. Pembentukan lembaga *ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan bab sebelumnya, kedudukan anggota *ahlul halli wal aqdi* ini setingkat dengan pemerintah, antara *khalifah* dengan *ahlul halli wal aqdi* bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik demi kemaslahatan umat karena majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu *khalifah* melaksanakan pemerintahan.

Ahlul Halli Wal Aqdi merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berperan menjalankan tugas dan wewenangnya. Salah satu tugasnya adalah membuat peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tersebut *ahlul halli wal aqdi* melakukan musyawarah untuk perkara-perkara umum kenegaraan, dan mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan. Undang-Undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua *syariat* Islam yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *ahlul halli wal aqdi* adalah undang-undang *illahiya* yang disyariatkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadist. *Kedua*, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh *nash*. Disinilah perlunya *ahlul halli wal aqdi* tersebut diisi oleh *mujtahid* dan ahli *fatwa* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan *ijtihad* untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*. *Ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-masalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang

akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat. Dalam *ijtihad* tersebut dilakukan dengan cara musyawarah.

Sama halnya *fiqh siyasah* dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya pada tingkat Desa. Pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa, dan BPD sebagai wakil rakyat di Desa. Peran BPD Desa Ujumbou sama halnya dengan peran *ahlul ḥalli wal aqdi* yang membentuk aturan hukum atau disebut dengan Peraturan Desa pada tingkat desa serta melakukan pengawasan anggaran dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu fungsi BPD Desa Ujumbou juga sudah melakukan fungsinya sesuai dengan prinsip *jalb al-masalih dan daf al-mafasid* yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudhorotan. Dalam fungsinya serta melakukan pengawasan dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut BPD Desa Ujumbou dalam menyusun perdes mereka selalu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri.

Dalam tinjauan *fiqh siyasah* dalam hal legislasi tidak dijelaskan secara detail mengenai bagaimana mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, hanya dijelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan hanya dengan musyawarah oleh anggota *ahlul ḥalli wal aqdi*. *Ahlul ḥalli wal aqdi* membuat hukum untuk mengatur umat agar menciptakan suatu kedamaian dan keamanan dalam kehidupan bernegara. *Ahlul ḥalli wal aqdi* menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam *syariat* dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Keterkaitan kewenangan yang dimiliki oleh BPD apabila ditinjau dari ketatanegaraan Islam maka dapat disamakan ke dalam teori *ahlul ḥalli wal aqdi*. Keterkaitan keduanya yaitu didasarkan pada keidentikan kewenangan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga *ahlul ḥalli wal aqdi* yaitu membuat peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja dalam penyusunan peraturan Desa sudah optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perdes yang sudah diundangkan dan sudah melihat serta mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa dalam pengawasan belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan kurang transparannya kepala desa kepada BPD, kurang harmonisnya hubungan sesama BPD, kurang harmonisnya hubungan pemerintah desa dengan ketua BPD, dan adanya keterlibatan kekeluargaan antara salah satu anggota BPD dengan pemerintah desa yang melemahkan secara konstitusi dari fungsi BPD itu sendiri, sehingga dalam hal pengawasan tidak berjalan dengan baik dan maksimal. Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik, hal itu sendiri dapat dilihat dari adanya beberapa permbangunan didesa berasal dari aspirasi masyarakat melalui penyampaian langsung ataupun hasil dari musrembang desa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala antara lain: *pertama* faktor pendukung adalah adanya partisipasi dari masyarakat. *Kedua* faktor penghambat adalah sarana, pendanaan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Kedua, fungsi Badan Pemusyawaratan Desa di Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala jika ditinjau dari fikih *siyasah* lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai lembaga legislasi, lembaga yang paling dikenal sebagai pembuat undang-undang, pelaksana *syura* dalam pengawasan, atau sejalan dengan yang dicontohkan Nabi saw., menjunjung tinggi konsep *syura*, dan sesuai dengan konsep kepemimpinan, namun dalam implementasinya terutama dari aspek pengawasan BPD Desa Ujumbou belum optimal dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Binjai, Hasan, Halim, Abdul, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013
- La Samsu, Al-Sultah Tasy'iyah Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah, *Tahkim*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 Pasal 1
- Wijayanti, Pratiwi, *Aspirasi Hidup Anak Jalanan Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro: Fakultas Psikologi, 2010
- Wawancara dengan Bapak Zain Dg. Matata* (Keapal Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, 27 Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak Ayub* (Kaur Pemerintahan Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), 29 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bapak Arifudin* (Anggota BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), 29 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bapak Baldam* (Ketua BPD Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), 1 Januari 2022.
- Wawancara dengan Bapak Ismai* (Sekretaris Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), 7 Januari 2022.
- Wawancara dengan Ifan* (Tokoh Pemuda Desa Ujumbou Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala), 9 Januari 2022.